

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pihak manajemen bertanggung jawab untuk melaporkan laporan keuangan sebagai cerminan atas kerja mereka kepada pemilik perusahaan. Menurut Jensen *et al.* (1976) dalam Bonang, 2013 menyatakan baik pemilik perusahaan (prinsipal) maupun manajer (agen) merupakan pemaksimum kesejahteraan, sehingga adanya kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Laporan keuangan tersebut dapat berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan individu atau perorangan, maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran dalam isi suatu laporan keuangan yang membantu pihak eksternal dimana laporan keuangan tersebut harus memberikan informasi yang benar bagi pengambilan keputusan. Peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak (agen dan prinsipal) dengan kepentingan berbeda tersebut (Lee, 1993 dalam Bonang, 2013), yaitu untuk memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan.

Dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) auditor memiliki tugas yaitu memberikan opini audit yang berkualitas dan selalu dituntut untuk mampu menjaga independensinya. Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh maupun tekanan pihak lain,

jujur serta mempertimbangkan fakta sesuai kenyataannya serta tidak boleh adanya hubungan kekeluargaan dengan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, sikap ini merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik dan sangatlah penting untuk kualitas audit.

Independensi seorang auditor kembali dipertanyakan sejak adanya Kasus manipulasi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satu contohnya PT Kimia Farma yang melibatkan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Banyak pihak yang menempatkan auditor sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Salah satu faktor yang memicu masalah ini adalah independensi auditor. KAP HTM telah melakukan pengauditan keuangan PT kimia Farma. Seharusnya KAP HTM mengetahui kemungkinan adanya aksi manipulasi yang dihadapi oleh kliennya, Kimia Farma, mengingat KAP HTM adalah KAP yang telah berdiri cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa tahun lama berdirinya suatu kantor akuntan publik tidak cukup untuk menjamin kualitas audit yang dilakukan. Oleh karena itu diperlukan komite yang dapat menjaga sistem pengendalian internal yang memadai serta melakukan pengawasan kinerja auditor eksternal untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan kejadian seperti itu, banyak Negara kemudian memperbaiki struktur pengawasan terhadap auditor dengan menerapkan rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) secara wajib untuk mencegah auditor terlalu dekat dalam berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensinya (Giri, 2010). Pengawasan

yang dilakukan untuk auditor dalam menjaga independensinya dengan cara pembatasan masa jabatan. Dengan adanya pembatasan masa jabatan tersebut auditor dicegah untuk berinteraksi terlalu dekat dengan kliennya. Rotasi KAP secara wajib (*mandatory*) di Indonesia telah diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/ 2003. Peraturan ini membahas tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau auditor, untuk KAP paling lama lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Peraturan ini dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/ 2008 tentang jasa akuntan publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh KAP selama maksimal enam tahun buku berturut-turut dan auditor selama maksimal tiga tahun berturut-turut, menyebabkan perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pergantian auditor dan KAP mereka setelah jangka waktu tertentu.

Dengan ditetapkannya kebijakan Menteri Keuangan mengenai rotasi pergantian KAP secara wajib selama jangka waktu tertentu, fenomena pergantian auditor atau KAP yang dikaji adalah bukan yang wajib tetapi yang sukarela. Carcello dan Neal (2003) dalam Sinarwati 2010 menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergantian auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan dan dimana salah satu faktor pemicu terjadinya pergantian KAP adalah opini audit. Opini audit modifikasi mengenai *going concern* dapat dinyatakan oleh auditor bahwa adanya keraguan

untuk klien melanjutkan usahanya. Penerbitan opini inilah yang membuat pergantian auditor menurut Luh Komang dkk, (2013). Opini *going concern* adalah opini yang tidak diharapkan perusahaan karena dapat berimbas pada kinerja perusahaan termasuk kemunduran harga saham, kesulitan meningkatkan modal pinjaman, kepercayaan investor, kreditor, pelanggan dan karyawan terhadap manajemen perusahaan (Wahyuningsih dan Suryanawa, 2010). Auditor juga bisa mengundurkan diri secara sukarela karena berbagai alasan. Salah satunya adalah untuk menghindari risiko litigasi yang melekat pada klien mereka (Rahmat,2009).

Komite audit merupakan elemen kunci di dalam struktur *corporate governance*. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris, anggota Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris atau setidaknya oleh Komite Nominasi, anggota Komite Audit terdiri dari orang-orang yang independen, seperti Komisaris yang tidak terlibat dalam pengurusan perusahaan dan pihak-pihak yang terafiliasi. Dalam hal ini peran dan karakteristik komite audit dipercaya dapat menghalangi usaha manajemen dalam melakukan pergantian auditor. Komite audit diharapkan dapat menjaga integritas proses pelaporan audit karena tugas dalam memberikan rekomendasi penunjukan dan penggantian KAP merupakan bagian penting dari peran, tanggung-jawab dan keberadaan komite audit itu sendiri (Lennox, 2002).

Keberhasilan komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tentunya dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti

usia, gender, kebangsaan, keahlian akuntansi dan keuangan, pengalaman bekerja, dan aktivitas komite audit. Penelitian-penelitian di Indonesia yang mengulas tentang karakteristik komite audit pada perusahaan masih sangat terbatas. Penelitian di Indonesia dilakukan oleh Kusumastuti, *et al.* (2007) yang menemukan bahwa persebaran anggota dewan mempengaruhi nilai perusahaan. Darmadi (2011) menyatakan hasil yang berbeda yaitu diversitas dewan yang diasosiasikan berdasarkan gender, kebangsaan, dan usia tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya justru lebih banyak membahas tentang pengaruh karakteristik dewan direksi daripada karakteristik komite audit. Sebagai contoh karakteristik dewan direksi mempunyai hubungan dengan tingkat manipulasi laporan keuangan yang terjadi. Bertolak belakang dengan komite audit yang memiliki kecenderungan negatif terhadap tingkat manipulasi (Bradbury 2004 dalam Pujiastuti 2010).

Penelitian mengenai karakteristik komite audit telah dilakukan akan tetapi menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Luh Komang dkk (2013) menunjukkan bahwa opini *going concern* dan moderasi keahlian akuntansi dan keuangan memiliki pengaruh signifikan pada kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor sedangkan pengalaman *governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Amalia (2012) yang menyatakan bahwa opini *going concern* berpengaruh signifikan, akan tetapi moderasi keahlian akuntansi dan keuangan, dan pengalaman

governance tidak memiliki pengaruh signifikan pada kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor.

Dampak dari pemoderasi ini apakah seperti penelitian Carcello dan Neal (2003) dalam Amalia 2012 bahwa keahlian akuntansi dan keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan dengan pemecatan auditor, sedangkan pengalaman *governance* berpengaruh untuk mengurangi hal tersebut atau sebaliknya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit yang terdiri dari keahlian akuntansi dan keuangan, pengalaman bekerja di KAP dan usia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menambahkan variabel usia yang belum pernah diteliti sebagai karakteristik komite audit pada penelitian sebelumnya. Selain itu peneliti juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Dimana dalam penelitian sebelumnya hanya karakteristik keahlian akuntansi dan keuangan serta pengalaman bekerja di KAP.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menguji :
Apakah karakteristik komite audit memoderasi pengaruh opini *going concern* terhadap pergantian auditor secara sukarela?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

Memberikan bukti empiris mengenai karakteristik komite audit memoderasi pengaruh opini *going concern* terhadap pergantian auditor secara sukarela pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI di Indonesia.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dan peneliti kedepannya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai karakteristik komite audit yang menjelaskan bagaimana hubungan karakteristik dari komite audit, seperti usia, keahlian akuntansi dan keuangan, dan pengalaman bekerja di KAP terhadap pergantian auditor.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi KAP dalam meningkatkan mutu dan kualitas auditnya sehingga persepsi kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP dapat juga dilakukan dengan baik oleh KAP lainnya, selain itu penelitian ini juga sebagai wacana yang dapat memeberikan dasar pemikiran tentang peningkatan kualitas audit untuk mencapai tingkat kepuasan klien yang optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi permasalahan penelitian yang terdapat pada latar belakang masalah yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan perumusan masalah. Selain itu berisi juga tujuan dan manfaat penelitian yang berguna untuk mengungkapkan hal yang ingin dicapai, serta sistematika penulisan yang berisi ringkasan dan gambaran pada setiap bab yang terdapat dalam skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan serta yang mendukung terbentuknya perumusan hipotesis. Selain itu juga terdapat model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi informasi tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel. Selain itu juga berisi sampel dan populasi, alat dan metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi data dan analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya.